

BAB 1

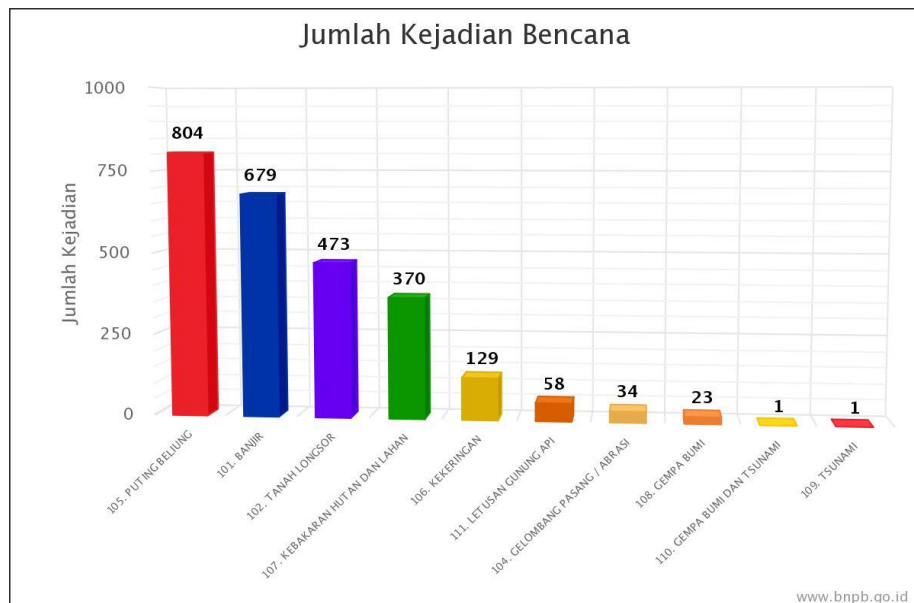
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR – 2002, 24) Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia yang terjadi secara tiba – tiba atau perlahan – lahan sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya. Penyebab terjadinya bencana secara umum dibagi menjadi 3, yaitu bencana yang terjadi karena faktor alam, non alam, dan sosial (manusia). Bencana alam merupakan kejadian bencana akibat dari bahaya alam yang merupakan hasil dari dalam (di bawah permukaan bumi), dari luar atau eksternal (topografi), cuaca (meteorologi/hidrologi), dan fenomena biologis. Contoh bencana alam yang sering terjadi, antara lain gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan karena faktor cuaca. Bencana non alam adalah kejadian bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial terjadi karena rusaknya dan tidak harmonisnya hubungan individu maupun sosial di antara anggota masyarakat yang disebabkan berbagai faktor baik sosial, budaya, suku atau terjadinya ketimpangan sosial. Bencana sosial antara lain konflik antar suku, agama, ras, dan munculnya gerakan separatisme.

Bencana alam di Indonesia memiliki jenis yang bermacam – macam, hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

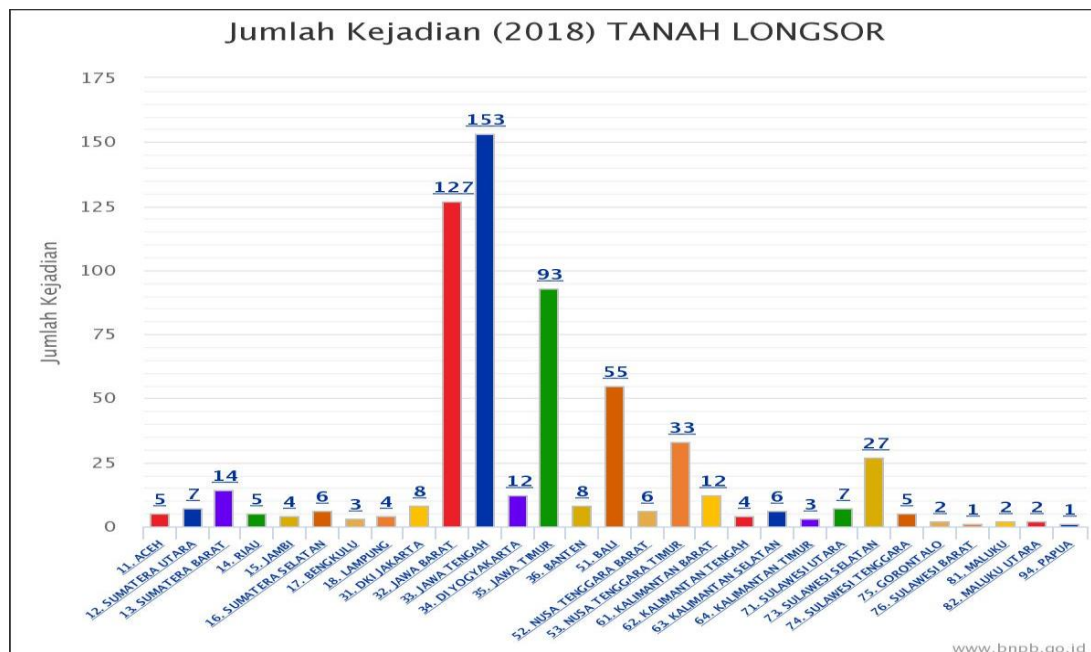
Gambar 1.1
Data kejadian bencana di Indonesia tahun 2018



Sumber : *Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019*

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa salah satu jenis bencana alam yang sering dialami oleh berbagai daerah di Indonesia yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan bencana yang sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang hidup di dataran tinggi atau pegunungan. Daerah yang berada di dataran tinggi biasanya rawan terjadi bencana tanah longsor. Indonesia memiliki potensi bencana tanah longsor yang cukup tinggi karena hampir semua daerah di Indonesia pernah mengalami bencana tanah longsor, hal ini dapat dilihat dari data berikut ini :

Gambar 1.2
Data Jumlah Kejadian Tanah Longsor di Indonesia



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwasannya di tahun 2018, bencana tanah longsor tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, dari wilayah Indonesia bagian barat yaitu Provinsi Aceh sampai ke ujung timur Indonesia Provinsi Papua. Persebaran bencana tanah longsor yang hampir merata di seluruh wilayah menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi dan kerawanan terhadap bencana tanah longsor yang cukup tinggi. Tingginya potensi tersebut membuat bencana ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah agar terjadinya bencana tanah longsor tidak menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat Indonesia.

Penanggulangan bencana tanah longsor selain menjadi perhatian pemerintah pusat, tetapi juga penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut menjadi tanggungjawab setiap daerah yang memiliki potensi atau tingkat

kerawanan bencana tanah longsor yang tinggi, salah satunya adalah Kabupaten Wonosobo. Mengingat bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki potensi terjadinya bencana yang cukup besar. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2013 Kabupaten Wonosobo berada di peringkat 20 dalam hal daerah rawan bencana.

Kabupaten Wonosobo memiliki potensi bencana tanah longsor yang cukup tinggi karena berdasarkan data yang dilansir oleh wonosobokab.go.id. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan sebesar (56,37%) kemiringan lereng antara 15 – 40%. Ditinjau dari ketinggiannya, kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 250 – 2250 mdpl. Kabupaten Wonosobo ditinjau dari struktur geologi termasuk dalam jenis pegunungan muda dan terletak di bebatuan *prakwater* sehingga sering mengalami bencana tanah longsor pada musim hujan.

Bencana tanah longsor merupakan bencana alam yang seringkali terjadi dan menjadi suatu hal yang umum di dengar oleh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Tercatat beberapa kali terjadi bencana tanah longsor yang cukup besar. Berdasarkan berita yang dilansir oleh TribunJateng.com. Tahun 2011 terjadi bencana tanah longsor yang cukup besar di Desa Tieng yang mengakibatkan puluhan rumah hancur diterjang tanah longsor dan 11 orang menjadi korban, sembilan diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Beberapa kali Desa Tieng juga terkena bencana tanah longsor, pada bulan Januari 2010 mengakibatkan jalan terputus, 6 warga tewas, dan 12 rumah rusak, kemudian di bulan Desember tahun yang sama terjadi tanah longsor lagi yang

mengakibatkan jalanan terputus dan longsor sepanjang 250 meter mengenai areal pertanian.

Selama lima tahun terakhir bencana tanah longsor selalu hadir di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo, beberapa wilayah yang sering terkena bencana tanah longsor dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo

No.	Lokasi Kecamatan	Kasus Tanah Longsor				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Leksono		14	6	8	3
2.	Kaliwiro	18	9	7	4	2
3.	Garung	4	3	4	2	6
4.	Wonosobo	10	12	14	6	3
5.	Watumalang	7	7	18	6	9
6.	Kalibawang	4	10	3	6	1
7.	Kertek	3	5	2		1
8.	Kepil	4	7	9	3	3
9.	Kalikajar	2	3	6	1	4
10.	Sapuran	2	3	6	1	2
11.	Mojotengah		2	4	9	8
12.	Wadaslintang	6	10	32	9	6
13.	Selomerto	5	13	6	4	2
14.	Sukoharjo	3	4	7	2	26
15.	Kejajar	5		13	6	5
	Jumlah	73	102	136	69	81

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Wonosobo tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015 - 2019 sangatlah tinggi, yaitu sebanyak 462 kejadian. Hal ini membuat bencana tanah longsor menjadi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Wonosobo. Banyaknya bencana tanah longsor tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh masyarakat baik material maupun immaterial.

Merespon banyaknya kejadian bencana yang sering terjadi, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga yang secara khusus memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Wonosobo.

Melihat besarnya potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo, maka penanganan bencana tanah longsor harus dilakukan secara serius karena terjadinya tanah longsor dapat mengganggu proses pembangunan. Perlu usaha yang besar dari BPBD Kabupaten Wonosobo dalam rangka penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo. Besarnya Usaha tersebut tercermin dari kinerja yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Wonosobo selama menangani bencana tanah longsor. Pentingnya peranan BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana, membuat BPBD Kabupaten Wonosobo seharusnya memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dari masing – masing unsur di dalam sebuah organisasi.

Kinerja BPBD dimulai dari tahapan pra bencana, tanggap darurat, sampai pasca bencana. Tahap pra bencana terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana, mengurangi resiko atau kerugian yang dihasilkan. Tanggap darurat bencana dilaksanakan ketika bencana terjadi, dan pasca bencana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memulihkan kondisi tempat terdampak bencana agar dapat difungsikan kembali oleh masyarakat seperti sebelum terjadinya bencana. BPBD Kabupaten Wonosobo melaksanakan tiga fungsi pada saat penanggulangan bencana, yaitu :

a. Fungsi pelaksana

BPBD Kabupaten Wonosobo memiliki peran untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana.

b. Fungsi Leading Sektor

BPBD Kabupaten Wonosobo mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang dilaksanakan oleh SKPD teknis. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing – masing SKPD namun tetap selalu berkoordinasi dengan BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana, sehingga penanganan bencana yang dilaksanakan oleh masing – masing SKPD dapat saling menunjang antar pembangunan fisik atau infrastruktur dan aman berdasarkan aspek kebencanaan.

c. Fungsi Komando

Fungsi komando melekat pada BPBD Kabupaten Wonosobo untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan dalam memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana.

Tiga fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi pedoman untuk dilaksanakan terhadap semua kejadian bencana di Kabupaten Wonosobo, termasuk bencana tanah longsor. Fungsi – fungsi tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang diwujudkan dari visi BPBD Kabupaten Wonosobo yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Wonosobo yang tangguh dalam menghadapi bencana demi terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua”.

BPBD sebagai sebuah organisasi terus berusaha mewujudkan visi tersebut agar dapat melindungi, mengurangi dampak kerugian, dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Usaha BPBD dalam mencapai tujuan tersebut, dapat dilihat melalui serangkaian kinerja yang telah dilakukan oleh BPBD selama ini, khususnya dalam penanggulangan bencana berpotensi tinggi di Kabupaten Wonosobo yaitu bencana tanah longsor. Kinerja organisasi merupakan salah satu hal utama yang menjadi sorotan permasalahan di dalam birokrasi pemerintahan karena menyangkut kesiapan, dan profesionalisme. Secara umum kinerja organisasi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kualitas pelayanan yang diberikan, produktivitas kinerja, responsivitas, dan akuntabilitas. Aspek kinerja tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana

kinerja BPBD dalam setiap proses penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Wonosobo.

Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor dapat dikatakan berjalan baik apabila telah memenuhi aspek kinerja yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kenyataan yang terjadi di lapangan terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. BPBD Kabupaten Wonosobo seringkali belum bisa merealisasikan atau mencapai target kinerja yang ditentukan, baik dari segi kualitas pelayanan, responsivitas, produktivitas, maupun akuntabilitas kinerja dalam menanggulangi bencana tanah longsor.

Permasalahan kinerja BPBD pada kualitas pelayanan berhubungan dengan bagaimana BPBD mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat dan kinerja pelayanan organisasi dalam memberikan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Tidak terpenuhinya indikator kualitas pelayanan menandakan bahwa masyarakat tidak terlalu puas dengan hasil kerja yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Hal ini dibuktikan dengan tindakan BPBD kepada wilayah atau lokasi yang terdampak bencana tanah longsor seringkali tidak sampai tuntas pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, hanya pada tahapan tanggap darurat yaitu kondisi dimana saat baru terjadi bencana tanah longsor. Kegiatan selanjutnya biasanya diserahkan oleh pemerintah setempat dan masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat yang menginginkan BPBD menuntaskan pekerjaannya untuk merehabilitasi wilayah terdampak bencana. Kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa BPBD

belum bisa sepenuhnya melaksanakan kegiatan manajemen bencana mulai dari tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Aspek kinerja selanjutnya yang belum bisa terealisasi atau belum mencapai target yaitu terkait dengan responsivitas. Responsivitas kinerja merupakan kemampuan BPBD dalam merespon kejadian bencana dengan cepat dan mengenali kebutuhan – kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Aspek responsivitas masih menjadi salah satu permasalahan kinerja BPBD, lebih tepatnya tentang kecepatan waktu respon dari BPBD ketika pertama kali mendapat laporan sampai ke lokasi terjadinya bencana tanah longsor yang masih belum responsif. Kondisi tersebut menandakan bahwa BPBD belum mampu merespon kejadian bencana dengan cepat. Berkaitan dengan kemampuan merespon kebutuhan masyarakat terdampak bencana juga masih menjadi persoalan. Ketika pada saat terjadi bencana tanah longsor yang besar, BPBD terkadang belum bisa memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan secara mendadak karena keterbatasan logistik yang tersedia.

Produktivitas kinerja juga menjadi salah satu aspek yang masih memiliki banyak kekurangan dalam tingkat pencapaiannya. Produktivitas BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor diwujudkan melalui banyaknya dokumen – dokumen yang mampu dibuat terkait dengan upaya pengurangan resiko bencana tanah. Berdasarkan data dari laporan akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo hanya terdapat 2 dokumen pemetaan detail rawan bencana tanah

longsor, dan 1 dokumen rencana kontingensi. Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwasannya tingkat produktivitas BPBD masih cukup minim.

Hal lain yang masih menjadi sorotan masyarakat yaitu mengenai akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh BPBD selama menanggulangi bencana tanah longsor. Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah instrumen yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas, pokok, dan fungsi dari sebuah organisasi. Instrumen pertanggungjawaban yang dimaksud salah satunya dalam bentuk publikasi, sistem pelaporan dan pendataan kebencanaan. Publikasi dan pengelolaan website resmi BPBD Kabupaten Wonosobo yang masih kurang diperhatikan karena masih kurang lengkapnya beberapa akses informasi yang seharusnya bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Publikasi kejadian bencana yang masih kurang jelas penataannya. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, mengindikasikan bahwa dalam hal akuntabilitas kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat belum bisa sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan beberapa aspek – aspek kinerja yang masih belum optimal di lapangan, menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo selama ini masih terdapat beberapa yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga bisa dilihat dari capaian kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo selama beberapa tahun terakhir, melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Tahun 2017 – 2019

Kinerja	Capaian		
	2017	2018	2019
Penyusunan Dokumen pemetaan detail rawan bencana tanah longsor	1 Dokumen yang berhasil disusun dari 5 yang direncanakan	Hanya dapat menyusun 2 dokumen dari 5 yang direncanakan	Hanya menyusun 2 dokumen seperti tahun sebelumnya dari 5 yang direncanakan
Penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana tanah longsor	Belum ada penyusunan dokumen kontingensi	1 Dokumen dari 5 yang direncanakan	Tidak terjadi penambahan penyusunan dokumen
Menyusun jalur evakuasi bencana tanah longsor	Belum ada penyusunan jalur evakuasi	Belum ada penyusunan jalur evakuasi	2 Jalur evakuasi (Kecamatan Watumalang dan Kejajar)
Pembuatan naskah kajian resiko bencana tanah longsor	Belum ada naskah yang dibuat	1 naskah yang dibuat yaitu pengkajian di kecamatan Kejajar	Tidak terjadi penambahan naskah yang dibuat

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD tahun

2017 - 2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa capaian kinerja dari tahun 2017 sampai 2019 masih banyak yang belum mencapai target bahkan masih ada beberapa yang belum bisa terealisasikan. Tahun 2017 masih sedikit capaian kinerja yang terpenuhi ditambah dengan jumlah kasus tanah longsor cukup tinggi di tahun tersebut. Tahun 2018 terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, beberapa dokumen berhasil disusun meskipun masih dibawah target yang ditetapkan. Kejadian tanah longsor di tahun ini juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2019 terjadi peningkatan kinerja namun tidak begitu signifikan. Kondisi ini ditambah dengan kejadian tanah longsor yang kembali meningkat, sehingga berdasarkan tabel tersebut bisa dikatakan bahwa capaian kinerja dalam penanggulangan bencana tanah longsor dari tahun 2017 – 2019 masih belum optimal.

Berdasarkan kenyataan – kenyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya, menandakan bahwasannya kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo masih belum sepenuhnya optimal dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Melihat kondisi dan permasalahan – permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dengan pertanyaan penelitian “Mengapa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor masih belum optimal”.

1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Fendi Irawan Sirapati (2015) Judul : Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di kampung lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat	Memberikan gambaran kinerja BPBD Kabupaten Kutai Barat dalam menanggulangi korban bencana banjir.	Deskriptif Kualitatif	Kinerja BPBD Kabupaten Kutai dalam penanggulangan korban bencana banjir secara umum sudah baik. Dilihat dari kreativitas saat menanggulangi bencana banjir, BPBD sudah membagi tugas - tugas staff yang terdiri dari bidang informasi dan komunikasi, sarana operasional dan kebutuhan perlengkapan. Kerjasama sudah terjalin dengan perusahaan – perusahaan di wilayah sekitar bencana serta pegawai BPBD juga sudah memiliki kecakapan, yaitu kemampuan dan kesanggupan dalam menanggulangi bencana banjir.	Perbedaan terletak pada indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu kreativitas, kerjasama, kecakapan dan tanggungjawab. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas.

2.	<p>Nur Khotimah Suri (2015)</p> <p>Judul : Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung</p>	<p>- Mengetahui kinerja BPBD Kabupaten Karo dalam upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung.</p> <p>- Mengetahui hambatan BPBD dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif dan Penggunaan teknik analisis SWOT</p>	<p>Kinerja BPBD Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi gunung sinabung belum optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya koordinasi antar unsur seperti TNI/Polri, relawan, LSM, dan Dinas Sosial. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan, serta kurangnya sarana prasarana.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan indikator kinerja yang berbeda serta penggunaan teknik analisis SWOT untuk menganalisis strategi menghadapi bencana. sedangkan Penelitian yang akan penulis teliti tidak terdapat analisis strategi dalam penanggulangan bencana.</p>
3.	<p>Biyan Anugrah Awusi (2018)</p> <p>Judul : Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam</p>	<p>Mengetahui Kinerja BPBD Kota Manado dalam Upaya Menanggulangi Korban bencana Banjir</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Kinerja BPBD Kota Manado dalam penanggulangan bencana banjir belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan alat atau sarana yang belum memadai dan keterbatasan sumber daya manusia yang</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada penilaian kinerja pada aspek akuntabilitas, sedangkan penelitian penulis, mendasarkan penilaian kinerja berdasarkan kualitas</p>

	upaya penanggulangan korban bencana banjir			professional di bidang kebencanaan.	layanan, produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.
4.	<p>Irvan Indriyan dan Dyah Hariani (2015)</p> <p>Judul : Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis kinerja BPBD Kota Semarang. - Menganalisis faktor pendukung dan penghambat Kinerja BPBD Kota Semarang. 	Deskriptif Kualitatif	<p>Kinerja BPBD Kota Semarang sudah baik tetapi belum optimal. Produktivitas, akuntabilitas, dan responsivitas sudah berjalan baik, namun masih terkendala dalam melaksanakan kegiatan yaitu masih bergantung kepada pihak ketiga dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencananya.</p> <p>Faktor Pendukung kinerja seperti koordinasi antar pegawai, dan kepemimpinan yang baik dan Faktor penghambat kinerja seperti belum terdapatnya bonus atau imbalan kinerja.</p>	<p>Kinerja BPBD dalam penelitian ini dijelaskan secara umum tidak spesifik dalam penanganan satu jenis bencana, sedangkan penelitian penulis akan menjelaskan kinerja BPBD secara khusus dalam satu jenis bencana yaitu tanah longsor.</p>

5.	<p>Sinta Syafril dan Dra Susi Sulandari, M.Si (2018)</p> <p>Judul : Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis dan mendeskripsikan kinerja BPBD dalam penanggulangan Banjir di Kota Semarang. - Menganalisis faktor pendorong dan penghambat kinerja BPBD dalam penanggulangan Banjir. 	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang disetiap tahapan bencana belum maksimal, seperti pada tahap pencegahan bencana yang dilihat dari aspek produktivitas, pembentukan Kelurahan Siaga Bencana belum mencapai target, pada saat terjadi bencana kualitas layanan belum memadai, pada aspek akuntabilitas belum semua informasi disebarluaskan kepada masyarakat.</p> <p>Kemudian Faktor pendorong kinerja adalah kepemimpinan dan tim yang baik, serta faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran dan kualitas SDM.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada jenis bencana yang diamati, dan lokus penelitian.</p>
----	--	---	------------------------------	--	--

6.	<p>Stephen Apanga, Gregory Titi Adebba, dan Denis Chirawurah (2017)</p> <p>Judul : <i>Community's Assessment of Disaster Responder Agency Performance During Disaster Situations in Rural Northern Ghana</i></p>	<p>Menilai kinerja NADMO (National Disaster Management Organization) oleh masyarakat yang terkena dampak bencana</p>	<p>Deskriptif Kualitatif dan penggunaan metode <i>Community Score Card</i></p>	<p>Kinerja NADMO (National Disaster Management Organization) di Ghana belum optimal, masih ditemukan banyak kendala seperti kurangnya sosialisasi/edukasi dalam menghadapi bencana, membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, jumlah bantuan masih kurang serta waktu respon dan pendistribusian bantuan yang lama.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada perbedaan indikator untuk mengukur kinerja, dan penggunaan metode <i>Community Score Card</i> dalam menilai kinerja.</p>
7.	<p>Lee Dae Wong (2019)</p> <p>Judul : <i>Collaboration and Performance in disaster and emergency</i></p>	<p>Mengetahui pengaruh sistem kolaborasi pemerintah terhadap kinerja organisasi dalam penanggulangan bencana.</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Kinerja Organisasi Penanggulangan bencana di Korea Selatan belum optimal. Hal ini dikarenakan kurang berpengaruhnya sistem kolaborasi antara pihak swasta dengan pemerintah dalam peningkatan kinerja,</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan dan fokus pada kinerja yang dipengaruhi oleh sistem kolaborasi,</p>

	<i>management: Focusing on South Korea</i>			kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah yang belum maksimal karena tidak adanya sistem desentralisasi, sehingga penanggulangan bencana diatur oleh pemerintah pusat.	sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan beberapa indikator dalam mengukur kinerja.
8.	Wen Jiung Wang (2019) Judul : <i>Disaster Response After Extreme Events in Taiwan: The Influence of Formal Institutions on Inter-Organizational Interaction</i>	Mengetahui kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana setelah terjadinya bencana ekstrim di Taiwan.	Kualitatif	Kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana sudah baik setelah terjadi dua bencana yang ekstrem di Taiwan. Pemerintah Taiwan memperkuat kapasitas manajemen bencana dengan adopsi program Disaster Prevention and Response Act (DPRA) untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam manajemen bencana.	Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh program, sedangkan penelitian penulis melihat kinerja organisasi berdasarkan indikator kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.

9.	<p>Fei Du, Kenji Okazaki, Chiho Ochiai (2017)</p> <p>Judul : <i>Disaster coping capacity of a fire-prone historical dong village in China: A case study in Dali Village, Guizhou</i></p>	<p>Mengetahui kinerja organisasi di Desa Dali dalam menanggulangi bencana kebakaran.</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Kinerja Organisasi dalam penanggulangan bencana kebakaran di Desa Dali sudah optimal, hal ini didukung karena sosialisasi yang baik, ditandai dengan pengetahuan masyarakat tentang tindakan darurat dan pencegahan kebakaran yang tinggi, serta pengawasan yang berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya inspeksi rutin terhadap resiko kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif.</p>
10.	<p>Abdullah Korkut Ustun and Gulay Barbarosoglu (2015)</p> <p>Judul : <i>Performance evaluation of Turkish disaster relief management</i></p>	<p>Mengetahui Kinerja organisasi – organisasi dalam bencana gempa bumi di Turki.</p>	<p>Kuantitatif dan penggunaan metode data envelopment analysis</p>	<p>Kinerja Organisasi – organisasi yang ikut berpartisipasi dalam menangani bencana gempa bumi di Turki belum optimal, hal ini dikarenakan terdapat 3 dari 5 Organisasi yang tidak efisien dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Non-</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuantitatif dan analisis data menggunakan teknik envelopment</p>

	<i>system in 1999 earthquakes using data envelopment analysis</i>			governmental search and rescue organization , General Directorate of Turkish Coal Corporation, dan Turkish Mountaineering Federation. Tidak Efisiennya kinerja tiga organisasi tersebut dipengaruhi oleh tindakan saat bencana berupa pencarian dan penyelamatan yang belum baik, pada saat bencana, pembersihan puing – puing dan rehabilitasi infratraktur belum maksimal, serta tindakan pasca bencana berupa pemberian perawatan bagi korban bencana berjalan baik.	analisis sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif tanpa menggunakan teknik analisis khusus.
--	---	--	--	---	---

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana gambaran kinerja BPBD dalam rangka menanggulangi suatu bencana. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu juga bisa dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pembanding dan pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, serta mampu menambah referensi dari teori – teori yang bisa digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo?
2. Apakah faktor – faktor yang menjadi kendala tidak optimalnya kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam Penanggulangan bencana tanah longsor?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
2. Melihat faktor - faktor yang menjadi kendala tidak optimalnya kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan dan pengetahuan baru bagi mahasiswa Administrasi Publik tentang bagaimana kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

b. Bagi BPBD Kabupaten Wonosobo

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja yang baik dan seharusnya dilaksanakan ketika menghadapi bencana tanah longsor.

c. Bagi Civitas Akademika

Menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa program Studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa Universitas Diponegoro pada umumnya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Administrasi Publik

Menurut Sondang Siagian (dalam Anggara, 2016:21) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan definisi publik secara umum merupakan sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki suatu tujuan yang sama. Menurut Kriyantono (2012:3) publik adalah sekelompok orang dalam masyarakat yang tidak harus dalam satu wilayah geografis yang sama, namun mempunyai perhatian atau kepentingan yang sama terhadap suatu hal.

Berdasarkan kedua pendapat ahli yang sudah mendefinisikan konsep administrasi dan publik secara terpisah, kemudian konsep tersebut dikembangkan dan dipadukan oleh beberapa ahli sehingga menjadi satu pemikiran tentang konsep administrasi publik. Salah satunya dikemukakan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola (*manage*), keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Menurut mereka administrasi publik juga merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang bertujuan untuk mengatur publik dan memecahkan masalah – masalah publik yang terjadi.

Pendapat Chandler dan Plano juga diperjelas serta lebih dirinci oleh John M. Piffner dan Robert V. Presthus (dalam Syafiie, 2010:23-24) menurut mereka administrasi publik meliputi :

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha – usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah terutama meliputi pekerjaan sehari – hari pemerintah.
3. Administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Berbeda dengan pendapat – pendapat ahli sebelumnya, Menurut Dimock, & Fox (dalam Keban, 2014:5) administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi ini melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik.

Definisi administrasi publik menurut Mc Curdy (dalam Keban, 2014:3) sejalan dengan pendapat John M Piffner dan Robert V. Presthus yang lebih melihat administrasi publik sebagai suatu proses politik atau sebagai wujud pelaksanaan berbagai macam kebijaksanaan pemerintah, menurutnya administrasi

digunakan sebagai salah satu metode memerintah dan melaksanakan berbagai fungsi negara. Berdasarkan pernyataan tersebut administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga mengandung persoalan politik. Hal ini menunjukkan bahwa dunia administrasi publik terus mengalami perkembangan sehingga sulit dipisahkan dari dunia politik.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai administrasi publik dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah seni dan ilmu untuk mengelola (*manage*) sumber daya yang ada untuk melaksanakan berbagai macam kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk mencapai tujuan suatu negara.

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik tumbuh dan berkembang dengan sejumlah paradigma yang menggambarkan cara pandang, metode, prinsip dasar, atau cara – cara memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh masyarakat pada suatu masa tertentu. Menurut Robert T. Golembiewski (dalam Keban, 2014:31) paradigma administrasi publik menitikberatkan pada fokus dan lokus. Fokus merupakan suatu metode atau cara untuk memecahkan sebuah persoalan, sedangkan lokus diartikan sebagai tempat dimana metode tersebut digunakan.

Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:31) terdapat lima paradigma dalam administrasi publik, yaitu :

1. Paradigma 1 (Dikotomi Politik dan Administrasi) 1900 – 1926

Tokoh dari paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Mereka mengatakan bahwa politik harus dipisahkan dengan administrasi. Pemisahan tersebut dimanifestasikan seperti lembaga legislatif yang berfungsi membuat suatu keputusan atau kebijakan dan lembaga eksekutif sebagai pelaksana dari keputusan atau kebijakan tersebut. Implikasinya adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dari *government* birokrasi, sehingga dalam paradigma ini hanya ditekankan lokus saja, tetapi fokusnya menjadi kabur atau tidak jelas.

2. Paradigma 2 (Prinsip – Prinsip Administrasi) 1927 – 1937

Tokoh dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick. Mereka memperkenalkan prinsip – prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip tersebut sering dikenal dengan istilah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang penerapannya sangat universal atau dapat diterapkan dimana saja. Sifatnya yang universal memberi dampak pada lokus dari administrasi publik tidak dapat diungkapkan secara jelas, sehingga dalam paradigma kedua ini fokus lebih ditekankan daripada lokusnya.

3. Paradigma 3 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik) 1950 – 1970

Paradigma ketiga ini justru kembali mempertanyakan tentang persoalan – persoalan pada paradigma pertama dan kedua. Banyak ahli mempertanyakan kembali perihal pemisahan politik dan administrasi

sebagai suatu yang tidak mungkin dan terdapat kritik bahwa prinsip – prinsip administrasi tidak konsisten serta menilai bahwa prinsip tersebut tidak berlaku universal. Administrasi publik dianggap bukannya bebas nilai tetapi justru dipengaruhi oleh nilai – nilai tertentu. Berawal dari hal tersebut kemudian paradigma ketiga ini meganggap bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip – prinsip administrasi mengandung banyak kelemahan, sehingga pada saat paradigma ini berlaku administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

4. Paradigma 4 (Administrasi Publik sebagai ilmu Administrasi) 1956 – 1970

Berlakunya paradigma 4 ini berkaitan dengan paradigma 2 tentang prinsip – prinsip administrasi yang lebih dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, seperti metode kuantitatif, analisis sistem merupakan fokus dari paradigma ini. Terdapat dua arah perkembangan yang terjadi, yaitu berorientasi kepada pengembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi kepada kebijakan publik. Sama dengan paradigma kedua, lokus dari paradigma ini tidak jelas karena semua fokus yang dikembangkan dapat diterapkan dimana saja, sehingga lokusnya menjadi kabur.

5. Paradigma 5 (Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik) 1970 – sekarang

Paradigma terakhir ini sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah – masalah dan kepentingan – kepentingan publik. Paradigma ini memberikan kejelasan mengenai fokus yang akan dipelajari di dalam studi Administrasi Publik dan sekaligus lokus atau tempat dimana studi atau teori itu dapat diimplementasikan. Adanya kejelasan antara fokus dan lokus dalam administrasi publik, maka paradigma ini dianggap sebagai suatu rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi publik dengan lokusnya, sehingga terdapat keterkaitan atau kesinambungan antara berbagai macam teori – teori yang dapat dipergunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah - masalah publik yang menjadi lokus administrasi publik.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk pada paradigma ke 5 yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Sebab di dalam paradigma ini sudah dijelaskan bahwa terdapat kejelasan antara fokus dan lokus di dalam administrasi publik, dimana fokusnya mengenai teori organisasi dan lokusnya antara lain masalah – masalah publik. Hal ini berarti paradigma 5 di dalamnya membahas persoalan – persoalan publik, sehingga sesuai dengan penelitian yang dibahas mengenai permasalahan yang berada di sebuah organisasi publik yaitu kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen secara umum merupakan proses dimana seseorang dapat mengatur atau mengorganisasikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. L.F Keller (dalam Keban, 2013:8) menganggap bahwa administrasi publik sebagai manajemen dan melihat bahwa administrasi publik sebagai *a system of management for complex public administration*. Hal ini menandakan bahwa manajemen publik merupakan bagian dari lingkup administrasi publik.

Menurut James A.F Stoner (dalam Handoko, 2003:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya – sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Drs Malayu Hasibuan (dalam Hariani, 2013:8) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua ahli tersebut menitikberatkan definisi manajemen pada sebuah proses pemanfaatan atau penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Luther Gulick (dalam Handoko, 2003:11) yang mengatakan bahwa manajemen sebagai suatu bidang keilmuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Definisi publik Menurut Syafi'e (dalam Pasolong, 2007:6) adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan norma – norma yang dimiliki.

Konsep publik menurut H. George Frederickson (dalam Pasolong 2007:6) terdiri dari beberapa persepektif, yaitu:

1. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.
2. Publik sebagai kelompok kepentingan yang diartikan sebagai interaksi kelompok dan perwujudan yang melahirkan kepentingan masyarakat.
3. Publik sebagai pemilih yang rasional, terdiri dari individu – individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.
4. Publik sebagai konsumen yaitu konsumen yang tidak terdiri dari individu – individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang besar mereka menimbulkan tuntutan terhadap pelayanan birokrasi.
5. Birokrasi sebagai warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sebuah hal yang penting.

Berdasarkan pendapat – pendapat ahli mengenai konsep manajemen dan publik, kemudian Sahya Anggara (2016:542) berpendapat mengenai konsep manajemen publik dalam satu definisi yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik yang dilaksanakan dengan menerapkan fungsi – fungsi manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Pendapat lain dikemukakan oleh Overman

(dalam Keban, 2013: 92-93) yang menyatakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik disisi lain.

Menurut Allison (dalam Mahmudi, 2015:39) mengidentifikasi tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik, yaitu :

1. Fungsi Strategi, meliputi:
 - a. Penetapan tujuan dan prioritas organisasi.
 - b. Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:
 - a. Pengorganisasian dan penyusunan staf.
 - b. Pengarahan dan manajemen sumberdaya manusia.
 - c. Pengendalian kinerja.
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:
 - a. Hubungan dengan unit eksternal organisasi.
 - b. Hubungan dengan organisasi lain.
 - c. Hubungan dengan pers dan publik.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai manajemen publik, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah tindakan pemerintah yang di dalamnya terdapat berbagai macam fungsi – fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang bertujuan untuk

menyelesaikan permasalahan dan melayani publik atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.4 Konsep Kinerja

Kinerja secara umum merupakan sebuah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Stephen Robbin (dalam Pasolong, 2017:176) mendefinisikan kinerja sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Moeheriono (2012:95) menyatakan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2012:7) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang memiliki hubungan erat dengan visi dan misi di dalam organisasi.

Ketiga pendapat ahli sebelumnya menitikberatkan pada hal yang sama yaitu melihat kinerja berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai. Berbeda dengan

pendapat yang diungkapkan oleh Berman dalam Keban (2014:209), menyatakan bahwa kinerja diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil.

Menurut Bernardin & Russel (dalam Keban, 2014:210) kinerja diartikan sebagai “*the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*”. Aspek yang ditekankan adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu.

Menurut Rummler dan Brache (dalam Sudarmanto, 2009:7) menyatakan bahwa terdapat tiga level kinerja, yaitu :

1. Kinerja Organisasi, adalah pencapaian hasil terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses, adalah pencapaian hasil pada proses dalam menghasilkan suatu produk atau pelayanan.
3. Kinerja individu, adalah pencapaian hasil yang dilakukan oleh individu.

Menurut Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2011:300), faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Faktor personal, meliputi: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.

3. Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota, kekompakan dan keeratan anggota.
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kerja organisasi.
5. Faktor kontekstual, meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

John Miner dalam Sudarmanto (2009:11) mengemukakan 4 dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja yaitu:

1. Kualitas : tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan.
2. Kuantitas : jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
3. Penggunaan waktu dalam kerja : tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja.
4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai kinerja, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kinerja atau *performance* adalah suatu tingkat pencapaian dari seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.6.5 Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh organisasi yang dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Bryson (dalam Sembiring, 2012:82) mengatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara para anggota dan komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Pendapat lainnya dari Wibawa dan Atmosudirjo (dalam Pasolong, 2011:176) mengemukakan bahwa kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha – usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kebutuhannya secara efektif.

Menurut M Mahsun (2006:20) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Kinerja organisasi dapat dilihat melalui beberapa ukuran – ukuran tertentu yang dapat dijadikan patokan untuk menilai besarnya capaian kinerja yang berhasil dipenuhi oleh sebuah organisasi. Ukuran atau indikator tersebut salah satunya dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008:50) yang memberikan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktivitas

Produktivitas secara umum merupakan kemampuan dalam memperoleh hasil (output) yang optimal melalui penggunaan sumber daya (input) yang ada di dalam organisasi secara efektif dan efisien. Secara lebih sederhana menurut L. Greenberg (dalam Sinungan, 2008:15) menyatakan bahwa produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran (output) dibandingkan totalitas masukan (input) selama kurun waktu tertentu. Menurut Siagian (2002:13), terdapat beberapa aspek – aspek produktivitas kerja, antara lain:

- Perbaikan terus menerus

Produktivitas kerja dapat dicapai oleh sebuah organisasi ketika semua komponen yang ada di dalamnya melakukan perbaikan secara terus menerus. Hal ini dikarenakan suatu organisasi selalu dihadapkan pada berbagai macam tuntutan yang terus berubah seiring perkembangan zaman.

- Peningkatan mutu hasil pekerjaan

Peningkatan mutu di dalam organisasi tidak selalu berkaitan dengan barang atau jasa yang dihasilkan, tetapi juga menyangkut dengan semua kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh semua satuan kerja di dalam organisasi yang dimaksudkan untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

- Tugas pekerjaan yang menantang

Tugas pekerjaan yang menantang dapat dijadikan salah satu faktor dalam meningkatkan produktivitas, karena tidak semua orang bersedia untuk mengambil resiko dengan melakukan pekerjaan yang menantang. Artinya di setiap jenis pekerjaan terdapat orang yang hanya melakukan tugasnya untuk memenuhi standar minimal dan rutin mereka lakukan. Kondisi tersebut seringkali memicu kebosanan dalam melakukan suatu pekerjaan dan juga bisa mengakibatkan mutu hasil pekerjaan menjadi rendah.

- Kondisi fisik tempat kerja

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi lingkungan tempat kerja dapat berpengaruh dalam peningkatan produktivitas kerja. Kondisi tempat kerja yang menyenangkan diperlukan untuk memberikan kontribusi peningkatan produktivitas kerja.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan berkaitan dengan bagaimana kepuasan pengguna jasa atau masyarakat terhadap kinerja yang diberikan oleh organisasi. Kepuasan masyarakat menjadi sumber utama dalam menilai kualitas pelayanan karena banyak pandangan negatif yang terbentuk dari organisasi publik disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diharapkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lewis & Booms (dalam Tjiptono & Chandra, 2011:180) bahwa kualitas layanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu terwujud sesuai

dengan harapan pelanggan atau masyarakat. Parasuraman (dalam Tjiptono, 2011:174) mengemukakan lima dimensi yang dapat digunakan dalam menilai kualitas layanan, yaitu :

- Berwujud (*Tangible*)
Fasilitas fisik, ketersediaan peralatan, dan personil atau pegawai.
- Empati (*Emphaty*)
Kepedulian dan perhatian kepada pelanggan atau pengguna layanan.
- Keandalan (*Reliabilty*)
Kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan.
- Daya Tanggap (*Responsiveness*)
Kemampuan dan kemauan pegawai untuk membantu pengguna layanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap.
- Keyakinan (*Assurance*)
Kemampuan dalam memberikan jaminan atau kepastian dalam pelayanan dan menghilangkan keraguan dalam pemberian layanan.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan dari organisasi untuk merespon atau menanggapi berbagai macam kebutuhan pengguna jasa dalam waktu yang cepat, dan tepat sesuai dengan jenis kebutuhan yang diinginkan. Menurut Agus Dwiyanto (2006:62) responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program – program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Agus Dwiyanto juga

mengemukakan indikator – indikator yang dapat digunakan untuk mengukur responsivitas, antara lain :

- Terdapat atau tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama kurun waktu satu tahun terakhir.
- Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa.
- Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa mendatang.
- Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa.
- Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Artinya responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan suatu organisasi bisa tunduk kepada para pejabat publik yang selalu konsisten dalam merepresentasikan kehendak rakyat. Hal ini menandakan bahwa suatu organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan nilai – nilai yang berkembang di masyarakat.

Pendapat lain yang sedikit berbeda dinyatakan oleh Adisasmita (2011:30) menurutnya akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas, pokok dan fungsi serta misi dari organisasi. Menurut Hopwood dan Tomkins (dalam Mahmudi, 2013:9) mengemukakan bahwa terdapat dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan, antara lain:

- Akuntabilitas Hukum

Terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi.

- Akuntabilitas Manajerial

Merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

- Akuntabilitas Program

Berkaitan dengan bagaimana program di dalam organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan serta merupakan program yang bermutu dan mendukung pencapaian visi, dan misi organisasi.

- Akuntabilitas kebijakan

Berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan – kebijakan yang diambil dan mempertimbangkan dampaknya di masa depan.

- Akuntabilitas finansial

Pertanggungjawaban organisasi publik dalam menggunakan dana publik secara efisien dan tidak ada pemborosan atau kebocoran dana.

Menurut Kumorotomo (dalam Pasolong, 2011:180) mengemukakan beberapa indikator kinerja yang dijadikan pedoman untuk menilai kinerja organisasi publik antara lain:

1. Efisiensi

Menyangkut pertimbangan keberhasilan organisasi dalam pelayanan publik, mendapat laba, memanfaatkan faktor – faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.

2. Efektivitas

Tujuan suatu organisasi tercapai atau tidaknya dilihat dari rasionalitas teknis, nilai misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan

Indikator ini mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

4. Daya Tanggap

Organisasi publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat.

Menurut Soesilo (dalam Tangkilisan, 2005:180), kinerja organisasi dipengaruhi adanya faktor – faktor berikut :

1. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.

3. Sumberdaya manusia, berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
4. Sistem informasi manajemen, berhubungan dengan pengelolaan database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai kinerja organisasi dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan serangkaian usaha yang dilaksanakan secara bersama – sama diantara anggota organisasi untuk mencapai suatu hasil kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai kinerja organisasi, maka penelitian ini akan menggunakan teori kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto dengan memakai empat indikator untuk mengukur kinerja yaitu kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Keempat indikator tersebut dirasa sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat melihat secara komprehensif terhadap kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

1.6.6 Penanggulangan Bencana

Bencana secara umum didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Menurut Rautela (dalam Kusumasari, 2014:3) menekankan bahwa bencana merupakan sebuah kondisi kerusakan dan guncangan yang menyebabkan kehancuran pada struktur sosial serta populasi yang terkena dampak bencana, tidak mampu mengatasi peristiwa tersebut dan membutuhkan bantuan pihak luar.

Asian Disaster Reduction Centre (dalam Kusumasari, 2014:3) mendefinisikan bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, material, atau lingkungan yang luas melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan harus mereka hadapi menggunakan sumberdaya yang ada pada mereka. Serupa dengan pendapat sebelumnya, menurut *UN – ISDR* (dalam Nurjanah, 2012:11) bencana merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba – tiba atau perlahan – lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya.

Penanggulangan bencana menurut Agus rahmat (2006:12) merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat terjadi dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Secara teknis dikemukakan oleh Carter (dalam Kodoatie, 2006:69) menyatakan bahwa tindakan penanggulangan atau pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu terapan (aplikatif) yang mencari dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan – tindakan

(*measure*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan.

Menurut Carter (dalam Kusumasari, 2014:4) mengidentifikasi empat karakteristik yang membedakan bencana dengan kejadian lainnya yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu :

1. Fokus pada kekacauan, dalam hal kecepatan serangan, prediksi, dan luasnya.
2. Kaitan efek atau dampak dari kejadian tersebut, misalnya kematian cedera atau penyakit, dan menyebabkan penderitaan.
3. Kerusakan atau kehancuran infrastruktur, seperti fasilitas penyangga hidup serta komunikasi dan layanan penting.
4. Adanya kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan, seperti perawatan kesehatan, tempat tinggal, makan, pakaian, dan kebutuhan sosial lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai penanggulangan bencana dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana merupakan sebuah kegiatan atau tindakan secara menyeluruh yang dimulai dari pra bencana sampai pasca bencana untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya bencana baik karena faktor alam maupun manusia yang tidak bisa diprediksi sehingga tidak mengakibatkan dampak yang besar.

1.6.7 Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah gerakan massa tanah dalam jumlah besar yang bergerak pada bidang geser tertentu, di mana pada bidang tersebut tahanan tanah

dalam menahan geseran terlampaui. Menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006:193) longsor terjadi karena ketidakseimbangan gaya – gaya yang bekerja pada lereng atau gaya dorong di daerah lereng lebih besar dari gaya tahan yang ada di lereng tersebut.

Terdapat karakteristik bencana tanah longsor menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006:193) antara lain:

- Periode peringatan bencana tidak pasti, kadang tidak ada peringatan sama sekali. Secara umum peringatan bencana tanah longsor apabila terjadi hujan terus menerus.
- Kecepatan kejadian bisa sangat cepat atau instan.
- Kerusakan infrastruktur bisa sangat besar.
- Apabila terjadi di dekat sungai menyebabkan aliran sungai terhalang, bisa terjadi banjir.
- Kadang daerah produktif bisa hilang sama sekali (longsornya tanah dari bukit).
- Longsor tidak harus terjadi pada lereng perbukitan, walaupun kemiringan lereng berpengaruh terhadap kejadian longsor. Longsor bisa juga terjadi pada daerah datar, hal ini tergantung stuktur dalam tanah.

Ada beberapa jenis longsor menurut Dikau (dalam Kodoatie, 2006:196) antara lain:

- Jatuh/runtuh (*fall*)
- Tumbang (*topple*).

- Gelincir (slide)
 - Gelincir berputar (slide rotational)
 - Gelincir bergeser (slide translational)
 - Gelincir blok (block slide)
 - Gelincir lempeng (slab slide)
 - Gelincir batuan (Rock slide)
 - Gelincir debris (debris slide)
 - Gelincir lumpur (mudslide)
- Penyebaran (spreading)
 - Penyebaran ke samping (lateral spreading)
 - Penyebaran batuan (rock spreading)
 - Penyebaran tanah (soil spreading)
- Aliran (flow)
 - Aliran batuan (rock flow)
 - Aliran lahar (debris flow)
 - Aliran tanah/lumpur (mudflow)
- Kompleks atau gabungan

1.7 Fenomena Penelitian

Kinerja Organisasi merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi untuk mencapai suatu hasil kerja tertentu yang berkaitan dengan visi, misi, maupun tujuan organisasi. Kinerja organisasi dapat diamati melalui beberapa fenomena tertentu, adapun di dalam penelitian yang berjudul

Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo, fenomena - fenomena yang diamati, antara lain :

a. Produktivitas

1. Perbaikan terus menerus
2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan
3. Tugas pekerjaan yang menantang

b. Kualitas Layanan

1. Ketersediaan fasilitas fisik
2. Kepedulian terhadap pengguna jasa
3. Kehandalan pegawai
4. Keyakinan atau jaminan pelayanan

c. Responsivitas

1. Terdapat atau tidaknya keluhan dari pengguna jasa
2. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan
3. Penggunaan keluhan sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan
4. Tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa
5. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku

d. Responsibilitas

1. Kesesuaian kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor dengan standar operasional yang berlaku
2. Mengikuti instruksi – instruksi yang diberikan pada saat menangani bencana tanah longsor
3. Memperhatikan keselamatan para personil pada saat melakukan kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor

e. Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Hukum
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan postpositivisme atau disebut juga interpretive karena data hasil dari penelitian berkenaan dengan data yang ditemukan di lapangan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak – banyaknya terkait suatu fenomena sosial

yang diteliti kemudian digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Pemilihan bentuk penelitian deskriptif ini dimaksudkan agar dapat memperoleh data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dan perilaku orang – orang yang sedang diamati sehingga penelitian ini dapat dibahas lebih mendalam oleh peneliti berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang ada di lapangan.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian kualitatif merupakan studi yang berlangsung dalam situasi alamiah, dalam arti peneliti tidak melakukan manipulasi latar (setting) penelitian. Situs penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo yang terletak di Jalan Raya Kalierang, Banaran, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek atau informan penelitian merupakan orang – orang yang memberikan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Seorang informan harus benar – benar tahu atau merupakan pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih informan juga dilihat dari kompetensi dan kesesuaian dengan permasalahan yang sedang diteliti bukan hanya sekedar menghadirkannya, sehingga penentuan metode yang tepat untuk digunakan dalam memilih informan perlu diperhatikan. Metode menentukan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

Teknik ini memilih informan berdasarkan karakteristik maupun kualitas tertentu dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.

Menurut Sugiyono (2007:300) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* artinya penentuan sampel mempertimbangkan kriteria – kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini berasal dari BPBD Kabupaten Wonosobo meliputi Kepala seksi kesiapsiagaan dan pencegahan, Kepala seksi kedaruratan dan logistik, serta Kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.8.4 Jenis data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2012:157) jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan serta dokumen atau sumber tertulis.

1. Kata – kata dan tindakan

Kata – kata dan tindakan merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Kata – kata dan tindakan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan di tempat penelitian. Peneliti melakukan pengamatan serta wawancara dengan informan terkait dengan topik penelitian yaitu Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo serta aspek – aspek yang menghambat kinerja BPBD tersebut.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis diperoleh dari buku – buku, internet, dokumen resmi, serta dokumen – dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5 Sumber data

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian di BPBD Kabupaten Wonosobo data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi langsung. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban dari pertanyaan – pertanyaan yang ditujukan kepada informan mengenai Kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asalnya seperti buku, dokumen, laporan maupun jurnal. Data sekunder berperan sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan akuntabilitas kinerja dan dokumen – dokumen resmi BPBD Kabupaten Wonosobo, jurnal – jurnal, peraturan – peraturan, dan dokumen resmi lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:308) menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data yang diperoleh yaitu fakta mengenai keadaan sebenarnya melalui proses observasi. Observasi mengandung proses pengamatan yang dilakukan secara jelas, rinci, lengkap dan sadar tentang fenomena yang sedang diamati. Observasi yang peneliti lakukan dengan cara mengamati bagaimana aktivitas dan tindakan seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang terkait dengan Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena peneliti menyiapkan instrument berupa pedoman wawancara atau *interview guide* sebelum proses wawancara dilakukan. Wawancara dalam penelitian ini secara langsung dilakukan kepada informan yang terkait dengan Kinerja BPBD Kabupaten dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dokumen – dokumen, data, dan informasi dari mana saja sepanjang dokumen tersebut berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Rencana Strategis BPBD Kabupaten Wonosobo, LKJIP BPBD dan data – data statistik terkait bencana tanah longsor.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2016:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan tentunya sangatlah banyak jumlahnya, untuk itu peneliti perlu mencatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, menfokuskan pada hal – hal

yang penting, sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data serta mencarinya apabila diperlukan. Data – data yang direduksi akan memberikan gambaran mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti dalam meneliti permasalahan.

2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks yang bersifat uraian atau naratif, grafik, matriks, dan chart. Penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan lebih menekankan pada penggunaan teks yang bersifat naratif serta didukung oleh tabel, grafik, dan bagan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data, sehingga kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam menganalisa data kualitatif.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan data. Pada penelitian kualitatif, untuk mendapatkan kualitas data yang valid dan reliabel,

diperlukan pengujian pada data yang diperoleh peneliti. Temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data berdasarkan atas kriteria derajat kepercayaan yang dilakukan dengan triangulasi data. Triangulasi menurut Sugiyono (2013:273) merupakan suatu bentuk pemeriksaan data yang terdiri dari beberapa macam jenis, seperti triangulasi sumber, triangulasi cara, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber. Metode triangulasi sumber berarti penulis membandingkan data yang diperoleh dengan melakukan pengujian data dari berbagai sumber. Proses Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang berkaitan.
4. Membandingkan ke dalam perspektif dan keadaan setiap orang yang berbeda pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah, tinggi maupun orang dalam pemerintahan.